

BAB III

PENGARUH ACEH DI KAWASAN PANTAI BARAT SUMATERA ABAD 17-18 M

A. Struktur Kekuasaan Aceh Darussalam Abad 17-18 M

Kesultanan Aceh Darussalam yang berdiri dari tahun 1496 hingga 1903, merupakan salah satu kerajaan islam yang berpengaruh di Asia Tenggara. Pada abad 17-18 M di bawah kepemimpinan sultan-sultan yang kuat, terutama Sultan Iskandar Muda, struktur kekuasaan dan pemerintahan kerajaan ini mengalami perkembangan yang signifikan. Pembentukan system pemerintahan dan politik Aceh itu berawal dari masuk dan berkembangnya islam di Peureulak, kesultanan islam pertama di Aceh. Seperti pedoman dalam naskah yang ditulis oleh Idhharul Haq, bahwa pada tahun 800 M adanya sebuah kapal yang mendarat dari Kambey (Gujarat) di Bandar Peureulak. Kapal tersebut banyak berisi orang-orang dakwah yang berasal dari Arab Quraisy, India dan Palestina.

Kedatangan mereka bukan hanya membawa misi dagang, tetapi juga menyebarkan islam di sana. Dari sanalah banyak warga setempat yang memeluk agama islam, dan tidak sedikit dari pendatang menikah dengan anak dara setempat. Salah satu pemuda yang berasal dari Arab Quraisy menikah dengan seorang putri dari Istana Peureulak dan melahirkan seorang putra mahkota yang bernama Abdul Aziz, diangkat menjadi raja pertama pada 1 Muharram 225/850 M. System pengurusan kerajaan ini mendekati system pemerintahan Daulah Abbasiyyah. Mungkin hal ini dipengaruhi oleh para pendatang. Dengan terjadinya peristiwa ini, Aceh dicatat sebagai tempat masuknya islam dalam pemerintahan dan politik ke Peureulak, Aceh Timur.³⁷ Dari penjabaran tersebut bisa dilihat bahwa Aceh Darussalam

³⁷ Hasanuddin Yusuf. Adan, *Islam Dan Sistem Pemerintahan Di Aceh Masa Kerajaan Aceh Darussalam*, 2014.

mengadopsi system monarki dengan seorang sultan sebagai pemimpin tertinggi.

Pada masa Kesultanan Aceh Darussalam yang didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Syah pada tahun 1496. Ia dipilih karena ketokohnya dan keberanian militernya, serta dedikasi kepada islam. Sekilas pada masa kepemimpinannya ia mampu menggabungkan beberapa wilayah yang sebelumnya bagian dari Kerajaan Lamuri menjadi wilayah kekuasaan Aceh seperti, Daya, Pidie, dan Pasai. Pada awal tersebut Aceh sudah melakukan ekspansi kecil-kecilan. Masih pada masa Ali Mughayat Syah, ia mampu meluncurkan kampanye militer untuk menguasai bagian utara Sumatera untuk mengusir penjajahan Portugis dari beberapa wilayah dengan kekuatan militer yang berasal dari kombinasi strategi perang yang efektif dan semangat jihad untuk mempertahankan kedaulatan Aceh.³⁸

Pada masa pemerintahan, beliau memakai system pemerintahan monarki absolut, dimana Sultan berfungsi sebagai pemimpin spiritual dan politik, dengan legitimasi kekuasaan yang kuat berdasarkan ajaran islam. Struktur pemerintahan yang digunakan pada masa itu ada Sultan sebagai kepala negara dan pemimpin militer, *Uleebalang* sebagai para penguasa daerah yang bertanggung jawab atas pemerintahan local dan pelaksanaan hukum islam, dan beberapa jabatan penting seperti, *Qadhi* (hakim) yang menangani urusan hukum dan keagamaan serta penasihat militer yang membantu sultan dalam strategi perang.³⁹

Begitu pula dengan Kepemimpinan Sultan Iskandar Muda (1607-1636) yang merupakan puncak kejayaan Kesultanan Aceh Darussalam pada abad 17-18 Masehi. Beliau mampu mengembalikan kedaulatan Aceh yang pada saat itu, sempat mengalami keterpurukan. Kecakapan Sultan Iskandar

³⁸ Muhammad Haikal, "EKSISTENSI KOMUNITAS RAJA-RAJA ACEH DALAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY DARUSSALAM-BANDA ACEH 2018 M / 1439 H" (UIN Ar-Raniry, 2018).

³⁹ Hasanuddin Yusuf Adnan, Op. Cit., Hal 128.

Muda dalam menjalankan system pemerintahan monarki absolut yang terstruktur dan terorganisir dengan baik, yang menggabungkan aspek politik, hukum, dan social. Ketika beliau menjabat bentuk territorial yang terkecil dari susunan pemerintahan di Aceh adalah *Gampong* atau kampung yang dikepalain oleh *Geucik* dan wakilnya disebut *Waki*.

Selain itu ada *Teungku Meunasah* dan *Ureung Tuha* yang membantu *Geucik*. Selain itu, sama seperti masa Sultan Ali Mughayat Syah ada Sultan (sebagai pemimpin tertinggi), dan *Uleebalang* (wakil sultan untuk mengawasi dan mengelola wilayah local), mereka-mereka lah yang memimpin daerah-daerah mereka sendiri. Selain itu juga ada Lembaga atau jabatan yang ada di kerajaan seperti, perdana Menteri yang bergelar *Orang Kaya Maharaja Seri Maharaja* ia adalah orang yang mengawasi wasir-wasir atau menteri-menteri di Kerajaan Aceh. *Kadli Malikul Adil*, ia adalah orang yang mengurus pengadilan agama di Kerajaan Aceh, jabatn *Kadli* ini pertama kali diadakan pada masa Sultan Iskandar Muda.

Orang Kaya Laksamana ia adalah Menteri pereperangan atau wazir al Harbiyyah, ia juga dipercaya untuk memimpin atau memegang Angkatan perang baik armada laut maupun angkatan darat. Selain itu, ada guru agama yang terkenal dengan ajaran tasawuf wujudiyyah dan termasuk orang penting di istana ia adalah Syamsuddin as Samatrani atau yang sering disebut Syamsuddin Pasai yang memiliki jabatan di Kerajaan Aceh dengan sebutan *Imam Muluk* (Imam Raja). Juru tulis Sultan sendiri ada *Keurukun Katibul Muluk* yang alih dalam menulis usrat-surat yang berhubungan dengan kepentingan kerajaan, untuk yang mengumpulkan bea cukai Pelabuhan disebut dengan *Balai Fardah*.⁴⁰

Sultan Iskandar Muda juga menetapkan sejumlah hak istimewa dalam masa pemerintahannya untuk menjaga keamanan dan ketertiban di kerajaannya. Seperti hak menjatuhkan hukuman kepada pelanggar hukum

⁴⁰ Rusdi Sufi, *Pahlawan Nasional Sultan Iskandar Muda*, n.d.

seperti, memotong tangan pencuri, menusuk orang bersalah dengan galah, dan memeperlihatkan hukuman mati dengan cara dijepit antara dua batang kayu. Selain hak-hak hukuman, sultan juga memiliki hak untuk menyembuyikan Meriam saat matahari terbenam, dipanggil dengan nama “daulat”, dan mencetak mata uang.

Dengan adanya hak-hak ini, Sultan Iskandar Muda berupaya untuk menjamin keamanan dalam negeri dan mengurangi kesewenang-wenangan para *uleebalang* (penguasa local) dalam menjatuhkan hukuman kepada rakyat. Langkah-langkah ini berkontribusi pada stabilitas dan kemakmuran kerajaan selama masa pemerintahannya, yang dikenal sebagai puncak kejayaan Kesultanan Aceh Darussalam.⁴¹ Tidak heran jika beliau mampu melakukan ekspansi wilayah besar-besaran hingga ke semenanjung Malaya.

B. Pengaruh Aceh Dalam Bidang Politik

Corak politik yang dipraktekkan di Kerajaan Aceh Darussalam adalah “Kesultanan” sebagai formulasi antara nasionalisme dan keagamaan. Istilah kesultanan itu berasal dari kata “sultan”, yang artinya dalam Bahasa aran adalah “pemegang kekuasaan”. Gelar ini awalnya diberikan oleh kekhalifahan yang berpusat di Baghdad. Namun, sepanjang sejarah, terutama pada abad ke-13 gelar ini mulai digunakan oleh kesultanan Turki Ottoman dan beberapa wilayah lainnya mengadopsi system ini tanpa harus mendapatkan legitimasi dari Baghdad. System pemerintahan kesultanan dengan gelar sultan sebagai kepala negara menunjukkan bahwa Aceh Darussalam adalah pemerintahan yang sah dan mandiri, berlandaskan ajaran Islam, serta bertugas untuk menerapkan islam sebagai dasar kenegaraan. Oleh karena itu, para penguasa Aceh diberikan gelar yang mengandung nilai-nilai politik dan religius. Oleh karena itu, para pemimpin Aceh dianugerahi gelar yang mengandung

⁴¹Ibaid, Hal, 45.

makna mendalam, baik dari segi politik maupun keagamaan. Sebagai contoh, Sultan Iskandar Muda memperoleh gelar “*Sayyidina wa Maulana Paduka Seri Sultan Iskandar Muda Johan Baerdaulat Zhill Allah fi al A’lam*” yang mencerminkan kedudukannya sebagai pemimpin yang berdaulat dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Hal serupa juga berlaku bagi penggantinya, Sultan Iskandar Thani. Sementara itu, Ratu Shafiyyat al-Din diberi gelar “*Sulhanah Taj al A’lam Shafiyyat al Din Berdaulat Zhill Allah fi al A’lam*” yang menunjukkan peran dan otoritasnya sebagai pemimpin perempuan dalam tradisi Islam.⁴²

Kesultanan Aceh Darussalam mencapai puncak kejayaan pada abad ke-17 di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda (1607-1636 M). Sultan Iskandar Muda dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan visioner. Di bawah pemerintahannya, Aceh tidak hanya menjadi pusat kekuatan politik, tetapi juga pusat kebudayaan dan agama Islam. Sultan berupaya keras untuk melindungi wilayahnya dari pengaruh penjajah Eropa, seperti Portugis dan Belanda, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sultan Iskandar Muda juga memperkenalkan berbagai kebijakan yang memperkuat posisi Aceh di dunia internasional, termasuk menjalin hubungan diplomatic dengan Negara-negara Islam lainnya dan mengirim utusan ke Eropa untuk memperkuat posisi dagang Aceh.

Berbagai macam cara yang dilakukan Sultan Iskandar Muda untuk mencapai kejayaan Kerajaan Aceh, dapat dilihat dari perjuangan-perjuangannya. Perjuangan fisik maupun perjuangan non fisik, dua bentuk utama yang dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda. Menurut Susanto Tirtoprojo perjuangan fisik adalah perjuangan dengan bentuk usaha perlawanan baik menggunakan senjata maupun benda-benda lain untuk mencapai tujuan, sedangkan perjuangan non fisik adalah perjuangan yang mengarah pada usaha yang bersifat damai. Perjuangan fisik yang

⁴² Marsus, Op. Cit., Hal 118

dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda ditandai dengan besarnya kekuatan armada dan Angkatan perang yang dimilikinya.

Menurut Augustin de Beaulieu, setelah Sultan Iskandar Muda memerintah, orang Aceh telah menjadi prajurit terbaik di kepulauan Nusantara. Kapal-kapal perang Aceh jauh lebih besar dari kapal-kapal yang pernah dibuat orang Eropa di zaman itu. Sedangkan untuk perjuangan non fisik yang dilakukan Sultan Iskandar Muda adalah meningkatkan perdagangan di Kerajaan Aceh yang dikenal sebagai pusat perdagangan lada di Sumatera dan menjalin Kerjasama dengan Bangsa India, Kerajaan Inggris, dan Kerajaan Prancis.⁴³

Selama kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, angkatan perang Aceh telah cukup kuat dan mampu bersaing dengan angkatan perang serta armada dari kerajaan-kerajaan modern pada waktu itu. Dengan kekuatan angkatan perang dan armadanya, Aceh telah menjadi kerajaan maritim, yang tangguh untuk mencapai hal ini. Sultan Iskandar Muda menjalin kerja sama dengan Kerajaan Turki dan Kerajaan Inggris dengan tujuan untuk mendapatkan bantuan dalam bentuk persenjataan serta ahli militer, sambil tetap memanfaatkan kekuatan yang sudah ada di Kerajaan Aceh. Kesultanan Aceh membangun dasar-dasar diplomasi yang kuat dengan kesultanan Turki Utsmani selama periode yang Panjang. Diplomasi ini bertujuan untuk menciptakan Kerja sama harmonis antara kedua kerajaan, hubungan Aceh dan Turki Utsmani dapat dikategorikan sebagai Kerja sama yang unik dan menarik. Meskipun terpisah oleh jarak geografis yang cukup jauh, di mana Kesultanan Turki Utsmani terletak di tengah Benua Eropa dan Kesultanan Aceh berada di tepi Asia Tenggara.⁴⁴

⁴³ Eka Yunita, Tontowi Amsia, and Syaiful M, "Perjuangan Sultan Iskandar Muda Dalam Mencapai Kejayaan Kerajaan Aceh Di Nusantara," *Jurnal Pendidikan Dan Penelitian Sejarah (PESAGI)* 3, no. 6 (2015): 1–12.

⁴⁴ Hartono Hartono, "Diplomasi Aceh Dan Turki Utsmani: Kerja Sama Dakwah Islam Dalam Bingkai Perdagangan Abad Xvi-Xix Masehi," *Al-Tsaqafa* :

Kerajaan Aceh sudah menjalin hubungan dengan Kerajaan Turki, sebelum Sultan Iskandar Muda memimpin. Pada saat itu, Kerajaan Turki menjadi pusat pemerintahan Islam yang melindungi kerajaan-kerajaan Islam lainnya, memperkuat hubungan dengan Turki. Hubungan antara Aceh dan Turki dimulai pada masa Sultan Ali Riayat Syah Al-Qahhar (1537-1571) ketika Sultan Turki Salim Khan menjalin persahabatan dengan Sultan Aceh dan mengirimkan kurang lebih 160 tentara, 200 serta tantara sewaan dari Malabar ini semua dikerahkan untuk melawan wilayah Batak di pedalaman Sumatera pada tahun 1539. Selanjutnya, Sultan Alauddin Mansyur Syah (1577-1586) memperkuat perjanjian yang ada dan mengirim bingkisan kepada Sultan Abdul Hamid Khan, menyatakan bahwa Turki akan melindungi Kerajaan Aceh. Pada masa Sultan Alauddin Riayat Syah Saidil Mukammil (1588-1604), hubungan ini terus berlanjut dengan Sultan Turki Mustaka Khan.⁴⁵

Pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda hubungan dengan Kerajaan Turki semakin dipererat dengan mengirimkan utusan ke Turki. Nyak Dum dipilih sebagai panglima dan kepala rombongan karena keberaniannya dan keahliannya dalam berbahasa Arab. Utusan itu berangkat dari Teluk Aceh dengan tiga buah kapal. Setelah pelayaran selama kurang lebih dua tahun, utusan ini tiba di Kerajaan Turki. Panglima Nyak Dum dan rombongannya memiliki kesempatan untuk melihat alat perang kerajaan Turki dan mempelajari taktik perang dari pewira Turki saat berada di sana. Utusan ini kembali ke Aceh setelah kurang lebih tiga bulan berada di Turki dengan membawa beberapa orang ahli membuat senjata dan meriam. Meriam ini dikenal dengan sebutan meriam *lada secupak*, dengan alasan telah memberikan lada secara simbolis yang

Jurnal Ilmiah Peradaban Islam 19, no. 2 (2023): 159–66, <https://doi.org/10.15575/al-tsaqafa.v19i2.19253>.

⁴⁵ Jajat Burhanudin, “Pasang Surut Hubungan Aceh Dan Turki Usmani: Perspektif Sejarah,” *Studia Islamika* 23, no. 2 (2016): 373–89, <https://doi.org/10.15408/sdi.v23i2.3259>.

dilakukan oleh Nya Dum kepada Turki sebanyak *secupak* (kurang lebih setengah liter) lada.⁴⁶ Dengan bantuan dari Turki, Aceh dapat memperkuat pasukan militernya, selain itu juga kerajaan Aceh berharap bisa membuat sendiri berbagai macam alat-alat untuk perang.

Pada abad 17 masehi Kerajaan Aceh melakukan ekspansi besar-besaran, terutama pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607-1636 M. Aceh memperluas wilayah kekuasaannya hingga mencakup sebagian besar Sumatera dan Semenanjung Malaya. Bahkan, wilayah yang sempat lepas ke tangan penjajah berhasil direbut kembali pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda. Di bagian sebelah timur, beliau melakukan ekspansi ke Aru, Deli, Pasai (Paeem) dan Pedir. Bagian Barat, menguasai Pariaman (Priaman), Tiku (Ticou), Padang (Negripadang), Pasaman (Piscan), Bataham (Batham), Barus (Baras), Singkel (Sinckel), Labu (Labo), dan Daya. Sedangkan untuk wilayah di Kawasan Semenanjung Malaya ada Perak (Pera), Pahang, Kedah (Kueda), dan Johor (Jhor). Pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda inilah Kerajaan Aceh menjadi kerajaan yang paling kuat di Nusantara bagian barat dan ini semua tidak terlepas dari kekuatan militer yang baik.⁴⁷

Kesultanan Aceh juga menghadapi tantangan besar dari bangsa Eropa pada abad ke-17 M, khususnya Portugis. Pada saat itu bangsa Portugis sempat mengirimkan utusan ke Aceh dengan tujuan berunding untuk mendapatkan benteng atau izin mendirikan benteng di pantai utara Sumatera. Fr. de Houtman menceritakan bahwa pada tanggal 15 November 1600 ada sebuah kapal dari Malaka dengan tujuan sebuah benteng yang bernama “Lubbock”. Selain itu Lancaster juga mencatat bahwa pada tahun 1602 utusan dari bangsa Portugis datang untuk meminta izin mendirikan benteng dan kantor dagang dari batu. Semua permintaan tersebut ditolak oleh Sultan, sehingga utusan portugis merasa kecewa dan

⁴⁶ Eka Yunita, Tontowi Amsia, dan Syaiful M, Op. Cit., Hal 6

⁴⁷ Marsus, Op. Cit., Hal 114

Kembali ke kapalnya. Hubungan ini pun semakin parah yang mengakibatkan pertempuran antara Aceh dan bangsa Portugis.⁴⁸

Pada bulan Juni 1606 armada Portugis kembali mendatangi Aceh dibawah pimpinan Don Martin Affonso de Castro untuk membalas dendam kepada Sultan yang telah menolaknya dan menerima pedagang Belanda. Perlawanan yang dilakukan oleh Aceh berhasil, sehingga mereka harus mundur dan kehilangan 300 pasukannya. Akhirnya Portugis Kembali ke kapal-kapalnya dengan hati yang kecewa karena merasa bahwa mereka akan mendapatkan kejayaan itu. Ini semua terjadi pada masa kepemimpinan Sultan Ali Riayat Syah dan Pada tahun 1607, Sultan Ali Riayat Syah meninggal, menurut “*Bustan us-Salatin*” Sultan meninggal pada hari Rabu, 4 April 1607.⁴⁹

Setelah kematian Sultan Riayat Syah, Sultan Iskandar Muda naik menjadi pemimpin Kesultanan Aceh pada tahun 1607. Sultan mempunyai tekad yang kuat untuk mengalahkan Malaka. Pada tahun 1615 beliau Kembali menentang armada Portugis yang kala itu dipimpin oleh Miranda dan Mendonca pertempuran ini pun terjadi begitu dahsyat dan pada akhirnya tetap dimenangkan oleh kapal-kapal Aceh.⁵⁰ Pertempuran itu terjadi lagi pada tahun 1616 dengan melawan Malaka dan menangkap sebuah kapal perang 40 Senjata. Pada tahun 1629 bangsa Portugis berhasil mendapatkan dukungan dari Semenanjung Malayu yaitu Johor dan Patani. Mendengar berita itu Sultan Iskandar Muda tidak hanya diam saja beliau langsung menyiapkan 400 kapal banyaknya, yang terdiri dari kapal-kapal besar dan kapal-kapal perang, *Momok Dunia* atau *Cakra Donya* (Ancaman

⁴⁸ Denys Lombard, *Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636)* (Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2014).

⁴⁹ <https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB31:040367000:00045> Catatan Sejarah Benteng Alam Pidie, Menceritakan tentang kedatangan salah satu utusan Portugis Martim Affonso de Castro ke Aceh, edisi 1916, Diakses pada hari Minggu, 02 Februari 2025, 23:23 WIB

⁵⁰ Denys Lombard, Op. Cit., Hal 141

Dunia), yang pada masa itu membangkitkan rasa takut setiap orang. Kapal-kapal tersebut berlayar dari Pelabuhan utama di Aceh, yaitu Banda Aceh, Daya, dan Pedir.⁵¹

Pasukan Aceh sempat menerobos Benteng Formosa, tetapi bantuan dari Goa (India) dibawah pimpinan Nuno Alvarez Botelho untuk Portugis membuat keseimbangan kekuatannya berubah. Sehingga pada saat itu Sri Maharaja terbunuh, dan Laksamana tertangkap, armada Aceh hancur dan ribuan prajurit tewas.⁵² Ini semua menjadi bencana besar bagi Sultan Iskandar Muda kala itu. Bahkan pertempuran ini pun menjadi pertempuran besar antara Aceh dan Portugis. Setelah terjadinya pertempuran tersebut hubungan Aceh dan Portugis semakin renggang hingga sepuluh tahun. Pada tahun 1632 perusahaan Hindia Timur kembali untuk membujuk Aceh, tetapi jawaban yang sama mereka miliki. Pada tahun 1636 Sultan Iskandar Muda meninggal dunia dan digantikan oleh menantu laki-lakinya yaitu Sultan Iskandar Thani. Mendengar berita itu Kolonial di Goa percaya akan adanya perubahan setelah penggantian tahta ini. Dengan keyakinan yang penuh dan keberanian mereka kembali mengirimkan utusan nya ke Aceh, dipimpin oleh mantan komandan Malaka yaitu D. Francisco de Sousa de Castro, yang dipilih untuk menyelesaikan misi ini dan ditemani oleh rombongan besar orang Portugis dan penduduk asli. Di antara mereka ada seorang pendeta, dan 4 orang religus: dua orang Fransiskan, P. Manoel de Osterro dan Saudara Franciscus, serta dua orang Karmellit, P. Dionysius seorang Nativitate dan saudara Redemptus.

⁵¹ Daya Negri Wijaya, "The 1629 Acehnese Invasion of Malacca: A Eurasian Perspective," *Paramita: Historical Studies Journal* 32, no. 2 (2022): 221–29, <https://doi.org/10.15294/paramita.v32i2.36883>.

⁵² <https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB34:178265001:00012> Majalah Sejarah, Menceritakan tentang bantuan yang diberikan oleh utusan dari Goa (India) untuk melawan Aceh, Edisi 01 Januari 1939, Diakses pada hari Selasa, 04 Februari 2025, 11:53 WIB

Pada tanggal 25 September 1638 di tengah permusahan yang terjadi, datanglah duta besar Portugis de Sousa de Castro dari Goa, ia membawa satu skuadron yang di terdiri dari dua kapal perang kecil dan sebuah kapak kargo, yang di dalamnya terdapat segala jenis amunisi dan material militer untuk Malaka. Berita ini telah diketahui oleh pihak Belanda melalui surat-surat yang di sita dari sebuah kapal yang dibajak. Sehingga komandan Cornelis Symonssen mengirim dua kapal pesiar dari perairan Malaka ke Pulau Weh untuk menemui kapal-kapal Portugis. Itu menjadi pertempuran yang sangat singkat dan sengit, dengan kerusakan yang sangat besar pada musuh. Setelah pertempuran yang dahsyat Sousa de Castro kehilangan prajuritnya dan dirinya sendiri terluka parah, tetapi masih bisa membawa kapalnya berlabuh dengan aman di dekat Pelabuhan Aceh. Salah satu kapal Portugis ditembak ke tanah dan ada juga yang ditangkap dan dibawa ke Aceh, dari 300 penumpang setengahnya tewas. Utusan itu sendiri selamat dan ditahan, dengan desakkan pemerintah Batavia, ia di pindahkan ke Perusahaan Hindia Timur oleh Istri Iskandar Thani yang pada saat itu menggantikan posisi suaminya Sultan Iskandar Thani yang telah meninggal pada bulan Februari 1641. Setelah di bawa ke Batavia ia kembali ke Goa pada tahun 1642. Setelah itu tidak ada lagi ditemukannya usaha pendekatan lagi.

Semenjak Belanda menguasai Malaka hubungan Aceh dengan Kompeni yang kuat tersebut mulai mendingin. Pada tahun 1666, dibawah pimpinan pemerintah Raja Muda Joao Nunez dn Cunha mengirim dua orang Fransiskan, Romo Gaspar Bautista dan Bro. Sebastiann untuk persiapan penyelesaian perjanjian perdamaian dan perdagangan dengan pemerintah Aceh. Pada saat itu yang memerintah ialah Sri Ratu Safi at din Taj Al-Alam, putri dari Sultan Iskandar muda. Ia menerima utusan Portugis dengan baik dan bersedia membuat perjanjian damai dan perjanjian perdagangan. Kapal-kapal Portugis diizinkan untuk menggunakan Pelabuhan tersebut sebagai tempat persinggahan, yang merupakan keuntungan strategis dalam perjalanan Panjang menuju Makau.

Hal ini sangat berarti bagi pendeta tersebut karena ia dapat bertemu dengan tiga ratus tahanan katolik yang tinggal di antara komunitas Muslim dan telah meninggalkan iman mereka. Ia berhasil membawa kembali Sebagian besar orang-orang yang terasingkan dan anak-anak mereka ke dalam Gereja. Setelah pertempuran pertama ini, Romo Bautista dan Br. Bastian meninggalkan Aceh dan segera kembali ke Goa untuk menyampaikan kabar baik. Namun, pemerintah kolonial tampaknya tidak sejalan dengan semangatnya, karena dengan berbagai alasan mereka membuatnya menunggu selama dua tahun yaitu pada tahun 1668.

Raja Muda tersebut meninggal dunia pada bulan November 1668, dan sementara itu, pemerintahan diambil alih oleh dua gebenor, Antonio de Mello de Castro dan Manoel Corte real de Sampajo. Mereka akhirnya setuju dengan permintaanya dan secara resmi mengangkatnya sebagai duta besar kerajaan. Ia tidak hanya diberikan kewenangan untuk merundingkan perjanjian damai, tetapi juga ditugaskan untuk meminta Sultanah untuk membebaskan umat Katolik yang ditawan atau setidaknya memberikan mereka kesemoatan untuk menjalani hidup sesuai dengan iman mereka. Oleh karena itu, pada bulan Mei 1671, Bautista berangkat ke Aceh untuk kedua kalinya. Ia berhasil dalam misinya, dan perjanjian damai pun tercapai. Selama periode pemerintahan yang silih berganti setelah wafatnya Sultanah Sri ratu Safi at din taj A'alam pada tahun 1675, tiga putri lainnya memerintah hingga tahun 1699, setelah itu kekuasaan kembali diserahkan kepada sultan. Meskipun demikian, tempat ini tetap dihuni oleh kaum Fransiskan, Jacob Jansz de Roy, yang tinggal di Aceh pada tahun 1696 dan pernah menceritakan dalam narasinya tentang pengalamannya di sana mengenai “para pendeta Portugis” yang memiliki

gereja di lokasi tersebut,⁵³ itu lah peristiwa yang terjadi pada abad ke-17 Masehi.

Pada abad 17 Masehi juga Kesultanan Aceh juga pernah dipimpin oleh empat ratu yaitu Sultanah Taj'Alam Syafiyyat Al-Din (1641-1675), Sultanah Nur Al-'Alam Naqiyyat Al-Din (1675-1699), Sultanah 'Inayat Shah Zakiyyat Al-Din (1678-1788), dan Sultanah Kamalat Al-Din (1688-1699). Setelah wafatnya Sultan Iskandar Thani sempat terjadi perebutan kekuasaan antara para elit dan ulama untuk menjadi pemimpin Kesultanan Aceh. Selama pernikahan Sultan Iskandar Thani dan Sultanah Taj'Alam Syafiyyat Al-Din tidak memiliki anak laki-laki, maka dilakukanlah pertemuan oleh Syeikh Nuruddin Ar-Raniry untuk membahas pengganti Sultan Iskandar Thani. Hasil keputusan tersebut ialah mengangkat Taj'Alam Syafiyyat Al-Din sebagai sultanah pertama Kesultanan Aceh. Beliau memiliki kemampuan berbahasa asing seperti Portugis, Persia, Belanda, Spanyol, dan Arab. Pada masa pemerintahannya Sultanah menunjuk Al-Singkil sebagai Qadhi Malik Al-Adil yang bertanggung jawab atas administrasi masalah keagamaan, dan beliau juga mengeluarkan sebuah keputusan tentang hukuman pencurian dan meminum-minuman keras. Dimana hukuman pendurian dibagi menjadi dua yaitu mencuri milik kesultanan dan milik umum, untuk sanksi mencuri milik kesultanan akan dikenakan hukuman mati, begitu juga dengan khamar.⁵⁴

Sekitar tahun 1675, terjadi pemberontakan terhadap Sultanah Nur Al-'Alam Naqiyyat Al-Din yang baru terpilih (1675-1678) menjadi pemimpin Kesultanan Aceh setelah Sultanah Taj'Alam Syafiyyat Al-Din

⁵³ <https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB34:178265001:00013> Majalah Sejarah, Menceritakan tentang pertempuran yang sengit antara Portugis, Malaka, dan Aceh Belanda, Edisi 01 Januari 1939, diakses pada hari Selasa, 04 Februari 2025, 20:54 WIB

⁵⁴ A. Hasjmy, *59 Tahun Aceh Merdeka Di Bawah Pemerintahan Ratu* (Jakarta: Bulan Bintang, 1977).

wafat. Pemberontakan ini melibatkan sekitar 700 orang yang menyerang istana dan berhasil mencuri 7 pikul emas (sekitar 6.176 kg emas, yang setara dengan nilai saat ini sekitar Rp 3.079.353.600.000) dari kesultanan. Pasukan kesultanan kemudian melawan para pemberontak, yang berujung pada penangkapan 500 orang dan 200 orang lainnya tewas dalam pertempuran. Syaikh 'Abd Rauf Al-Singkili, yang juga menjabat sebagai kepala hakim, menjatuhkan hukuman mati kepada semua pemberontak, kecuali seorang ulama yang dihukum dengan pemotongan kaki dan tangan karena dianggap sebagai penggerak pemberontakan, sementara harta benda mereka dirampas untuk menjadi milik umum. Selama masa pemerintahan Sultanah Nur Al-'Alam Naqiyyat al-Din (1675-1678), kedudukannya terus diguncang oleh konflik dengan para "Orang Kaya" yang tidak puas dengan pemerintahannya. Ketegangan yang berkepanjangan ini menyebabkan semakin lemahnya kekuasaan pusat. Wilayah-wilayah Kesultanan Aceh Darussalam mulai memberontak dan melepaskan diri, seperti Pahang, Kedah, dan Perlak, sehingga hanya wilayah Sumatera Utara yang tetap berada di bawah kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam. Di dalam kerajaan, terjadi proses dekonsentrasi kekuasaan, dan kehidupan keagamaan pada masa sultanah ini juga mengalami penurunan.⁵⁵

Pemerintahan Sultanah Nur Al-'Alam Naqiyyat Al-Din (1675-1678) ditandai oleh dua peristiwa penting. Pertama, munculnya beberapa kekuatan politik baru di pedalaman yang menjadi ancaman bagi pemerintah di ibu kota, Banda Aceh. Kekuatan baru ini dikenal dengan istilah *sagi*, yang membagi Aceh menjadi tiga wilayah otonomi: satu *sagi* terdiri dari 22 mukim, sementara dua *sagi* lainnya terdiri dari 26 dan 25

⁵⁵ Yanwar Pribadi, "Sejarah Hukum Islam Nusantara Abad XIV–XIX M , by Ayang Utriza Yakin," *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia* 174, no. 1 (2018): 134–37, <https://doi.org/10.1163/22134379-17401003>.

mukim. Peristiwa kedua adalah musibah terbakarnya Masjid Bayt al-Rahman dan istana kerajaan, yang mengakibatkan hilangnya kekayaan dan khazanah yang ada di dalamnya. Dalam bidang hukum, kebijakan yang diterapkan pada masa Sultanah Nur Al-'Alam Naqiyyat Al-Din (1675-1678) tidak banyak berubah, dengan hukuman untuk pencurian tetap berupa hukuman mati dan pemotongan tangan serta kaki. Menurut kesaksian Thomas Bowrey, hukuman di Kesultanan Aceh Darussalam dikenal sangat kejam, terutama untuk pelaku pencurian yang dihukum lebih berat dibandingkan dengan pelaku pembunuhan.⁵⁶

Masuklah kepemimpinan pada masa Sultanah Inayat Shah Zakiyyat Al-Din (1678-1688). Pada tahun 1683, Sultanah Inayat Shah Zakiyyat Al-Din menerima sebuah delegasi dari Syarif Makkah. Delegasi ini awalnya dikirim oleh Sultanah untuk menemui Sultan Moghul, Aurangzeb, namun dilaporkan bahwa Aurangzeb menolak untuk menerima mereka. Akibatnya, delegasi tersebut mengubah arah perjalanan mereka ke Makkah dan akhirnya tiba di Aceh dengan membawa surat-surat dan hadiah untuk sultanah. Sultanah merasa sangat senang dan meminta mereka untuk tinggal sejenak di ibu kota, sementara ia mempersiapkan hadiah-hadiah untuk Syarif Makkah. Diberitakan bahwa masyarakat Aceh mengirimkan berbagai hadiah dan sadaqah, termasuk sebuah patung yang terbuat dari emas, yang diambil dari reruntuhan istana dan Masjid Bayt al-Rahman yang terbakar pada masa pemerintahan Sultanah Nur Al-'Alam Naqiyyat Al-Din (1675-1678). Ketetapan hukuman yang diterapkan oleh Sultanah juga sama pada masa Sultanah Taj' Alam Syafiyyat Al-Din.⁵⁷

⁵⁶ Muhammad Ilham and Yullia Merry, "Kebijakan Hukum Pada Pemerintahan Sultanah Di Kesultanan Aceh Darussalam (1641-1699)," *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah* 10, no. 1 (2021): 1–13, <https://doi.org/10.36706/jc.v10i1.11484>.

⁵⁷ Azra Azyumardi, *Jaringan Ulama Timur Tengah & Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2013).

Kepemimpinan sultanah terakhir yaitu pada masa Sultanah kamalat Al-Din (1688-1699), pada masa kepeम्मimpinan sultanah menghadapi tantangan serius, terutama dari kelompok "orang kaya". Oposisi ini mencapai puncaknya ketika, seperti yang diungkapkan oleh William Dampier, "Empat Orang Kaya yang tinggal jauh dari istana mengangkat senjata untuk menantang ratu yang baru dan para Orang Kaya lainnya, serta membawa pasukan sekitar 5 hingga 6 ribu orang untuk menyerang ibu kota". Oposisi ini mengusung tuntutan agar kepemimpinan kesultanan dikembalikan kepada laki-laki. Ketika masa pemerintahan Sultanah Nur al-‘Alam Naqiyyat al-Din (1675-1678), pemimpin agama adalah Syekh ‘Abd Rauf al-Singkili. Ketika delegasi dari Makkah tiba, sebagian masyarakat Aceh mempertanyakan apakah hukum Islam mengizinkan seorang perempuan untuk menjadi penguasa. Namun, al-Singkili tampaknya tidak mampu memberikan jawaban yang jelas. Dalam karya fikihnya, *Mi’rat al-Thullab*, ia tidak membahas isu ini secara langsung. Ia dapat dianggap telah mengkompromikan integritas intelektualnya, baik dengan menerima pemerintahan perempuan maupun dengan tidak menyelesaikan masalah tersebut. Delegasi dari Makkah tidak memberikan jawaban langsung mengenai permasalahan ini, tetapi mereka membawa isu tersebut ke sidang para ulama di Haramayn.

Jawaban akhirnya tiba di istana Aceh pada masa pemerintahan Sultanah Kamalat al-Din (1688-1699). Mufti kepala di Makkah dilaporkan mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa pemerintahan perempuan bertentangan dengan syariat Islam. Akibatnya, Sultanah Kamalat al-Din diturunkan dari tahta, dan Umar bin Qadhi al-Malik al-Adil Ibrahim diangkat sebagai Sultan Badr al-Alam Syarif Hasyim Ba al-Alawi al-Husyni, yang mendirikan dinasti Arab Jamal al-Layn di Kesultanan Aceh. Dengan berakhirnya pemerintahan Sultanah Kamalat al-Din, maka berakhir pula kekuasaan para sultanah di Aceh. Syekh ‘Abd Rauf al-Singkili, yang diminta oleh rakyat untuk memberikan pandangan mengenai kepemimpinan perempuan, tidak dapat memberikan jawaban

yang memuaskan. Keputusan akhirnya diambil melalui sidang para ulama di Haramayn. Dengan keputusan tersebut, Sultanah Kamalat al-Din terpaksa menyerahkan kekuasaannya kepada seorang sultan baru, sekaligus mengakhiri era pemerintahan perempuan di Kesultanan Aceh Darussalam.⁵⁸

Pada abad ke-18 M, Kesultanan Aceh terlibat dalam perebutan kekuasaan yang berkepanjangan dengan Portugal, Inggris, dan Belanda. Pada akhir abad itu, pengaruh kekuasaan Belanda dan Inggris kepulauan Melayu terbagi, dimana Singapura, Pulau Pinang, Malaka, dan Kawasan utara, sebagai hak milik Inggris, sedangkan dibawah pengaruh Belanda di Kawasan sebelah selatan. Dalam konteks ini, Aceh berusaha kuat untuk mempertahankan kedaulatannya melalui aliansi strategis dan diplomasi, meskipun sering kali terjebak dalam konflik yang melibatkan kekuatan asing. Kesultanan Aceh, yang pada masa itu merupakan salah satu pusat perdagangan dan kekuatan militer yang signifikan, berupaya untuk menguasai jalur perdagangan rempah-rempah yang sangat menguntungkan. Namun, dengan meningkatnya kekuatan Belanda dan Inggris, Aceh menghadapi tantangan yang semakin besar. Meskipun mengalami beberapa kemenangan dalam pertempuran, Aceh tidak dapat menghindari dampak dari intervensi kolonial yang semakin mendalam. Perang dan konflik yang terjadi selama abad ini tidak hanya mengubah peta kekuasaan di kawasan tersebut, tetapi juga mempengaruhi struktur sosial dan ekonomi masyarakat Aceh. Ketidakstabilan yang ditimbulkan oleh persaingan antara kekuatan kolonial ini menciptakan ketegangan yang berkepanjangan, yang pada akhirnya mempersiapkan panggung bagi konflik yang lebih besar di abad-abad berikutnya.

⁵⁸ Muhammad Ilham dan Yulia Merry, Op. Cit., Hal 11

C. Pengaruh Aceh Dalam Bidang Ekonomi

Pada abad 17 Masehi, kerajaan Aceh mengalami kemajuan yang signifikan dalam perekonomian dan perdagangan. Aceh menjadi kekuatan ekonommi terkuat di bagian barat Nusantara, mampu membendung perkembangan kolonial Portugis. Kejayaan Aceh tidak terlepas dari pemanfaatan keuntungan posisi geografisnya sebagai pintu masuk Selat Malaka yang merupakan jalur pelayaran internasional. Aceh mencapai kejayaan pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda baik itu dari segi politik, militer, perekonomian-perdagangan, dan keagamaan. Pada masa itu, Aceh mengekspor berbagai komoditas seperti kayu cendana, sapan, resin (gandarukem), damar, getah perca (laban), obat-obattan, parfum (kamian putih dan hitam), kapur, pucuk, rasmala, bunga lawing, lada gading, lilin, tali sabuk, dan sutera. Sementara itu, komoditas impornya meliputi beras, guci, gula, sakar lumat, minyak, bijih besi, besi, anggur, kurma, timah putih dan hitam, besi lantak, kain cinde dari Gujarat, guci dari Pegu, pinggan batu, mangkuk batu, kipas, kertas, opium, kopi, tile, tembakau, tekstil dari katun Gujarat, masulipatan dan keeling, batik mori dari Malabar, air mawat pati, dan lain-lainnya. Begitu juga dengan para pedagang yang datang ke Aceh seperti Tingkok, India, Jawa, Siam, India, Turki, Perancis dan Belanda.⁵⁹

Perekonomian Kerajaan Aceh sangat terbantu oleh perdagangan lada yang signifikan. Sultan Iskandar Muda berupaya meningkatkan pendapatan kerajaan dengan memonopoli perdagangan lada di Aceh dan sekitarnya, menetapkan harga tinggi untuk komoditas ini di Banda Aceh. Ia juga memberlakukan bea cukai sebesar 7% dari harga yang diterapkan untuk kapal yang berlabuh, sehingga meningkatkan pendapatan kerajaan.

⁵⁹ Arif Rahman, "Peran Kerajaan Aceh Melawan Penjajahan Dan Menyebarkan Islam Di Nusantara Pada Abad 16-18 M," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 8, no. 5 (2021): 1333-44, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i5.21894>.

Untuk memperluas perdagangannya, Aceh juga menjalin Kerjasama dengan kerajaan local di Nusantara dan negara asing seperti Eropa, India, dan Inggris, dengan lada sebagai komoditas ekspor utama.⁶⁰ Pada awal abad 17 Masehi mata uang yang digunakan adalah mata uang yang dilukis oleh Varthema yang dibuat dari emas yang ditemukan di pegunungan dalam pasir halus sungai-sungai, yang di dalam emas ada gambar pagonda, dan sebelahnya lagi ada gambar pedati.⁶¹

Pedagang-pedangan asing yang datang dari berbagai negara dan tertarik dengan lada yang dimiliki Aceh. Semua transaksi lada harus dilakukan di bandar-bandar Aceh, dan semua pedagang asing diperlakukan sama. Kapal-kapal dari Arab, Persia, Pegu, Turki, Siam, India, Inggris, Prancis, dan Belanda mengantri untuk memuat lada. Aceh berhasil menjadi bandar internasional, dan kapal-kapal asing membawa barang dagangan dari negara asalnya.⁶² Pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Syah Al-Mukammil, beberapa Pelabuhan dagang dibangun Aceh, salah satunya adalah Pantai Cermin (*Ulee Lheu*). Peta yang dibuat pemerintah Belanda pada tahun 1898 menunjukkan bahwa Ujong Pancu berdekatan dengan Pantai Cermin. Dalam sejarah Aceh, terdapat beberapa pusat perdagangan rempah di Aceh Besar, yaitu Ujong Pancu sebutan untuk Kawasan Peukan Bada (Lamguron, Lambadeuk, Lambaro Neujiid, dan Lampageu), Kuala Gigieng sebutan untuk Kawasan Baitussalam (Baet, Cadek, Kajhu, dan Lambada Lhok), dan Krueung Raya (Lamreh/Lamuri, Ie Suom, dan Sekeitarnya). Ketiga Kawasan ini diduga menjadi tempat berlabuhnya kapal dan pedagang local maupun asing, serta

⁶⁰ Yeyen Novita et al., “Analisis Sistem Ekonomi Kerajaan Aceh Darussalam Pada Masa Pemerintahan Sultan Iskandar Muda,” *Journal on Education* 5, no. 3 (2023): 8333–39, <https://doi.org/10.31004/joe.v5i3.1621>.

⁶¹ Denys Lombard, Op, Cit., Hal 153

⁶² Dewi Setyawati, “Editor in Chief Section Editor,” *SINDANG: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Kajian Sejarah* 5, no. 1 (2023), <http://ojs.stkippgri-lubuklinggau.ac.id/index.php/JS/index>.

menjadi lokasi pemukiman kuno. Perubahan iklim, cuaca, dan bencana alam menyebabkan hilangnya pemukiman penduduk dan pekabuhan kuno di Kawasan pesisir tersebut.⁶³

Aceh tidak saja membangun hubungan baik dengan negara local, tetapi juga dengan negara-negara lain seperti Bangsa Cina, Bangsa India, Bangsa Turki, Bangsa Perenggi (Orang Inggris, Prancis, dan Belanda). Hubungan antara Aceh dan bangsa Cina telah terjalin sejak lama, terutama melalui jalur perdagangan laut. Secara diplomasi, hubungan ini dimulai pada awal abad 15 Masehi. Pada tahun 1409 M, salah satu utusan dari Cina memberikan kenang-kenangan sebuah genta atau lonceng yang berukuran besar dan terdapat tulisan berhuruf arab dan tulisan juga tulisan berhuruf Cina. Lonceng itu bernama “Cakra Donya” yang memiliki tinggi 1,25 meter dan lebarnya 75 sentimeter, terbuat dari besi berbentuk seperti stupa. Lonceng ini dibawa ke Banda Aceh pada tahun 1524 sebagai hasil rampasan perang setelah Sultan Ali Mughayat Syah menaklukkan Samudera Pasai. Lonceng ini merupakan hadiah dari Laksamana Cheng Ho kepada Sultan Pasai, lonceng ini dibuat pada tahun 1409.⁶⁴ Tidak sedikit orang cina yang tinggal di Aceh, ada yang sepanjang tahun dan ada juga yang datang sekali setahun. Bahkan mereka mengambil rumah yang saling berdekatan di ujung kota dan berdekatan dengan laut bahkan dinamakan dengan “kamp Cina”.

Berbeda dengan pedagang-pedagang yang berasal dari negeri-negeri “di atas angin” yang memegang bagian terbesar dari perdagangan Aceh ialah bangsa India. Mereka juga memiliki akar yang kuat dalam sejarah perdagangan dan kebudayaan. Dominasi kekaisaran Mughal di Samudra Hindia menjadikan kebudayaan Islam-India periode Mughal

⁶³ Jovial Pally Taran et al., “Jejak Perdagangan Rempah Di Pesisir Aceh Besar” 14, no. 1 (2023).

⁶⁴ Yuni Saputri, “Sejarah Masuknya Etnis Tionghoa Di Aceh Dalam Perspektif” 7, no. September (2023): 133–47.

sebagai bagian tak terpisahkan dari kebudayaan Islam di Nusantara, terutama di Kesultanan Aceh. Banyak orang Benggali datang dengan bandela-bandela kapas, kain, candu, dan guci besar yang berisi mentega atau minyak yang diminati oleh orang Aceh. Raja Golkanda juga mengekspor baja, besi, kain putih dan hitam, dan beberapa intan ke Aceh melalui Masulipatam. Ia juga mengimpor kemenyan, kamper dari Barus, lada dari Pariaman dan juga Tiku, dan untuk barang porselin dan sutra yang belum diwarnai dari Cina. Begitu juga dengan orang Malabar yang datang ke Aceh membawa ikan asin dan terasi. Pada tahun 1630 sempat terjadinya kelaparan besar yang melanda Gujarat sehingga pada saat itu jutaan orang mati dan ini berpengaruh pada kelancaran perdagangan. Tetapi perdangan ini kembali pulih lagi ketika Dampier mengatakan bahwa orang Gujarat sama seperti orang Cina yang memiliki banyak tok disana.⁶⁵

Hubungan antara Aceh dan Turki Utsmani terjalin dalam jangka waktu yang lama dari abad XVI hingga XIX. Pada saat itu Aceh memerlukan legitimasi kekuasaan dan dukungan dari Turki Utsmani untuk menghadapi ancaman musuh, terutama Portugis. Turki Utsmani juga dianggap sebagai pemilik kekuatan besar sebagai pemegang kendali pemerintahan Islam yang berjaya. Turki Utsmani dan Aceh juga memiliki musuh yang sama, yaitu Portugis sehingga saling mengirim bantuan personel dan materiil untuk perang. Sementara Turki melihat Aceh sebagai sekutu strategis di wilayah Asia Tenggara. Kerjasam ini meliputi berbagai bidang, bukan hanya bantuan militer saja. Tetapi juga pertukaran budaya dan keagamaan melalui ulama dan mubaligh, hingga tumbuh hubungan dagang yang saling menguntungkan. Dampak dari hubungan ini sangat signifikan karena dapat memperkuat posisi Aceh sebagai kerajaan islam yang kuat dan menjadi penghalang bagi dominasi Portugis di Samudra

⁶⁵ Denys Lombard, Op. Cit., Hal 167-169

Hindia. Meskipun sempat mengalami pasang surut, hubungan Aceh dan Turki tetap menjadi bagian penting dari sejarah kedua bangsa tersebut.⁶⁶

Selanjutnya adalah hubungan dengan Bangsa Perenggi, istilah kata “Perenggi” adalah bentuk kata tutunan dari kata Prancis atau “Franc”, inilah yang disebut dengan bangsa Eropa dalam teks Melayu.⁶⁷ Pada awal abad ke-17, tercatat tiga ekspedisi Prancis yang mengunjungi Aceh. Ekspedisi pertama dipimpin oleh Jenderal Frottet de la Bardeliere dengan kapalnya, Croissant, yang tiba pada 26 Juli 1602 dan berhasil mendapatkan izin berdagang dari Sultan Alauddin Riayat Syah. Namun, untuk menghindari penyitaan, ia memerintahkan keberangkatan lebih awal, tetapi kapal tersebut dicegat oleh Belanda dan muatannya dirampas. Ekspedisi kedua adalah kapal Saint-Louis, milik "Kumpulan kapal Montmorency", yang mungkin singgah di Aceh, meskipun seorang anggota ekspedisi dilaporkan dibunuh atas perintah Sultan.⁶⁸

Ekspedisi ketiga dan paling berhasil dipimpin oleh Augustin de Beaulieu, ia tiba pada tahun 1621 pada masa pemerintahan Sultann Iskandar Muda. Kedatangannya bertujuan untuk menjalin hubungan dagang di Bandar Aceh dan meminta izin berdagang di wilayah-wilayah taklukan Aceh di pantai barat Sumatera, termasuk Pelabuhan Tiku. Beaulieu membawa hadiah-hadiah serta sebuah surat. Laporan rinci dari De Beaulieu memberikan pandangan mata mengenai kebesaran Sultan Iskandar Muda, tata wilayah, dan kekuatan armada Aceh. Kunjungan ini juga bertujuan untuk membeli lada langsung dari petani, meskipun pada akhirnya Beaulieu mengalami berbagai kendala seperti harga yang tinggi, pajak, dan kualitas lada yang kurang baik. Serta menghadapi permusuhan dari Belanda dan kehilangan dua kapalnya, berhasil kembali ke Prancis dengan muatan lada dari Sumatra pada tahun 1622. Auhustin De Beaulieu

⁶⁶ Hartono, Op. Cit., Hal 161-165

⁶⁷ Denys Lombard, Op. Cit., Hal 170

⁶⁸ Denys Lombard, Op. Cit., Hal 173

Auhustin De Beaulieu juga memberikan sebuah hadiah kepada Sultan Aceh berupa senjata, cermin, dan air mawar. Air mawar ini kemungkinan berfungsi sebagai parfum atau pengharum.⁶⁹

Kerajaan Aceh juga menjalin hubungan bilateral dengan Inggris dan negara-negara Eropa lainnya sejak abad ke-16. Ratu Elizabeth mengirim utusannya pada tanggal 5 Juni 1602 yang bernama Sir James Lancaster ke Aceh dengan surat yang ditujukan kepada “Saudara Hamba, Raja Aceh Darussalam” yaitu Sultan ‘Ala ad-Din Ri’ayat Syah. Sultan Aceh menerima baik maksud Inggris dan mengizinkan mereka berlabuh dan berdagang di wilayahnya, ia juga membebaskannya dari pajak “usur” dari hak tawanan karang dan hak raja atas warisan. Selan itu juga ada perjanjian yang dibuat oleh Lancaster dan Sultan Aceh. Hubungan antara Aceh dan Inggris mengalami pasang surut, mencapai puncaknya pada paruh pertama abad ke-19, dan memberikan pengaruh signifikan bagi kedua belah pihak. Lee Kam Hing (merupakan salah satu kalangan akademisi yang menempatkan pentingnya hubungan Aceh dan Inggris dalam sejarah diplomatic Aceh abad 18 dan 19) menekankan pentingnya hubungan diplomatic Aceh dan Inggris pada abad ke-18 dan 19. Bagi East India Company (EIC), EIC adalah perusahaan multinasional yang pertama di dunia yang memiliki hak monopoli atas pedangan di Asia dan bemarkas di Batavia, EIC didirikan pada tahun 1602 yang dibentuk oleh pemerintah Belanda.⁷⁰ pada akhir abad ke-18 ditandai dengan meluasnya pengaruh politik-ekonomi di Selat Malaka. Aceh dianggap strategis karena pelabuhannya yang besar menawarkan nilai ekonomis dan militer, serta

⁶⁹ Eka Yunita, Tontowi Amsia, Syaiful M., Op. Cit., Hal 10-11

⁷⁰ Rosmaida Sinaga et al., “Kongsi Dagang Inggris (EIC) Dan Belanda (VOC): Pengaruhnya Dalam Jaringan Perdagangan Antar Benua” 1, no. 2 (2024): 521–28.

menyediakan komoditas dagang yang memenuhi standar pasar India dan Cina.⁷¹

Hubungan antara Aceh dan Belanda dimulai pada tanggal 21 Juni 1599, ketika Cornelis De Houtman memimpin dua kapal dagang Belanda ke Pelabuhan ibu kota Kerajaan Aceh. Awalnya, Sultan Aceh (Sultan Alauddin Riayat Syah Al-Mukkamal) menyambut baik kedatangan mereka, berharap perdagangan dengan Belanda akan meningkatkan hasil bumi seperti lada dan rempah-rempah. Sultan memberikan kemudahan dan kebebasan kepada pedagang Belanda untuk membeli lada.⁷² Namun, hubungan ini kemudian berubah menjadi konflik. Belanda ingin menjajah Aceh karena kekayaan alamnya yang melimpah. Pada tahun 1857, Aceh dan Belanda mendatangi perjanjian yang berisi kesepakatan untuk saling mengakui dan menghormati kedaulatan masing-masing. Pada 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang terhadap Aceh. Perang Aceh disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk keinginan Belanda untuk merebut kedaulatan Aceh, menguasai sumber daya alamnya (terutama lada hitam dan minyak bumi), dan menghilangkan negara pribumi yang independen. Selain itu, pembukaan Terusan Suez pada tahun 1869 membuat Belanda khawatir Aceh akan jatuh ke negara Barat lain.¹ Belanda juga menjadikan hubungan diplomatik Aceh dengan Konsul Amerika, Italia, dan Turki di Singapura sebagai alasan untuk menyerang. Perang Aceh berlangsung lama dan sengit. Meskipun Belanda berupaya menaklukkan Aceh, rakyat Aceh melakukan perlawanan yang kuat.⁷³

⁷¹ Lailatussyukriyah, "PERDAGANGAN LADA DI ACEH ABAD 19 Lailatussyukriyah Hartutik" 4, no. 1 (2017): 69–89.

⁷² Jihan Fahira, "Kebijakan Politik Kolonial Belanda Dalam Menaklukkan Aceh" 1, no. 1 (2024): 1–11.

⁷³ Ika Purnamasari et al., "Perang Aceh Perlawanan Terhadap Kolonisasi Belanda Aceh War Resistance Against the Colonialization of the Netherlands" 5, no. 2 (2024).

D. Pengaruh Aceh Dalam Bidang Keagamaan

Penyebaran Islam di Aceh diperkirakan mulai pada abad ke-7 atau ke-8 M melalui jalur perdagangan maritim. Pedagang dan mubaligh dari Gujarat, Persia, dan Arab membawa ajaran Islam ke pelabuhan-pelabuhan penting seperti Perlak, Lamuri, Barus, dan Samudera, serta menjalin hubungan perkawinan dengan penduduk setempat. Aceh menjadi wilayah pertama di Nusantara menerima Islam dan menjadi tempat berdirinya kerajaan Islam pertama. Para ulama juga berperan penting dalam penyebaran Islam, sering kali melakukan perjalanan dengan kapal dagang untuk tujuan khusus menyebarkan agama. Proses islamisasi di Aceh berjalan damai, terutama melalui perdagangan, meskipun penyebaran Islam juga dilakukan melalui kekuasaan setelah raja memeluk Islam. Hal ini menjadikan Aceh sebagai pusat penyebaran agama Islam ke daerah lain di Nusantara.⁷⁴

Sejarah Aceh dari awal pembentukannya sangat dipengaruhi oleh Islam, yang menjadi ciri khas dan ideologi yang menyatu dengan masyarakat. Umumnya disepakati bahwa Aceh adalah wilayah pertama di Nusantara yang menerima Islam, sehingga menjadi tempat lahirnya kerajaan Islam pertama dan menandai dimulainya peradaban Islam di wilayah ini. Keunikan Islam di Aceh terletak pada perannya tidak hanya sebagai agama dalam keseharian dan kebudayaan, tetapi juga sebagai dasar negara dan pedoman hukum tertinggi. Masyarakat Aceh pada masa itu berhasil mewujudkan Islam dalam sebuah peradaban yang maju. Semua perilaku negara dan rakyatnya didasarkan Islam. Itu semua tercantum dalam sebuah adgium: *adat bak po teumeuruhom, hukom bak syiah kuala, kanun bak putroe phang, reusam bak laksamana*. Kurang lebih maksud dari adgium itu ialah “adat yang dijaga dan dikendalikan oleh raja, ajaran Islam dijalankan dibawah kendali pengawasan ulama,

⁷⁴ Dede Mathlubul Fard, “Sejarah Islam Di Nusantara,” 2019, 1–20.

peraturan daerah yang ditetapkan setelah adanya musyawarah atas dasar saran dari putra phang (seorang permaisuri dari Sultan), hubungan silaturahmi sebagai adab.

Dari Aceh, agama Islam kemudian menyebar dan menjadi agama mayoritas di Nusantara. Islam di Aceh berkembang menjadi sebuah peradaban yang memengaruhi kehidupan masyarakat. Ajaran Islam yang diterima langsung dari Mekah dan Madinah memberikan corak keislaman yang khas pada Aceh. Proses penyatuan Islam dengan adat setempat berlangsung dengan sangat baik, sehingga muncul ungkapan “*Adat ngon syara’ lagee zat ngon sifeut*” yang artinya “adat Aceh adalah Islam, dan Islam telah menjadi sifat rakyat Aceh”. Semangat egalitarian dan peradaban yang terbuka menjadikan Aceh sebagai daerah yang kosmopolit dan lebih cepat maju. Letaknya yang strategis sebagai pusat lalu lintas Nusantara dan budaya dari Asia dan Eropa menjadikan Aceh sebagai negeri bandar yang lebih maju dibandingkan kerajaan lain di Nusantara.⁷⁵

Aceh memiliki sejarah panjang sebagai pusat keilmuan Islam di Nusantara. Tradisi ini berakar sejak berdirinya Kerajaan Samudera Pasai pada abad ke-13. Kerajaan ini menjadi daya tarik bagi para pedagang dan pelancong yang tidak hanya bergadang, tetapi juga menyebarkan dakwah dan memperdalam ilmu agama. Banyak guru dari luar Aceh, bahkan dari luar Asia tenggara, datang untuk menetap dan mengajar ilmu agama Islam. Setelah Kerajaan Samudera Pasai bergabung ke dalam Kerajaan Aceh Darussalam, Aceh tampil sebagai kekuatan yang terpadu dalam berbagai bidang, termasuk pemikiran Islam. Pada abad ke-16 hingga ke-18 M, Aceh mencapai puncak kejayaan dan menjadi pusat keilmuan Islam yang menarik ulama dari Arab, Persia, dan India. Banyak orang Islam dari berbagai daerah di Nusantara datang ke Aceh untuk belajar kepada ulama-ulama besar. Murid-murid yang belajar di Aceh kemudian kembali ke

⁷⁵ Syarif Hidayatullah, “Bukti Hubungan Kerajaan Aceh Dan Kesultanan Turki Utsmani Dalam Naskah Khotbah Jihad,” n.d.

daerah masing-masing untuk menyebarkan Islam dan tradisi keilmuan yang berkembang di Aceh. Selain itu, posisi Aceh sebagai tempat persinggahan jamaah haji Indonesia juga memberikan dampak positif bagi penyebaran dan perkembangan ilmu pengetahuan dan pengajaran agama Islam.⁷⁶

Ada beberapa ulama Aceh yang sangat berpengaruh di Nusantara dan Asia tenggara yaitu: Hamzah Fansuri, Syamsuddin As-Sumatrani, Nuruddin Ar-Raniry, dan Abdurrauf Al-Singkil. Menurut catatan sejarah, Hamzah Fansuri dilahirkan di kota Barus, yang pada masa itu dikenal sebagai Kota Fansur yang terletak di provinsi Sumatera Utara, yang terletak antara Singkil dan Sibolga. Beberapa pendapat menyatakan bahwa ia berasal dari Bandar Ayudhi (Ayuthia), Ibu kota Kerajaan Siam, di desa Syahru Nawi di Siam, Thailand. Sementara yang lain mengatakan bahwa Syahru Nawi adalah nama lama untuk Aceh. Tahun lahir dan wafatnya Hamzah Fansuri belum diketahui secara pasti, tetapi ia diperkirakan hidup sebelum 1603-an karena muridnya, Syamsuddin al-Sumatrani, yang juga seorang komentator buku Syarhh Rubb, wafatnya pada tahun tersebut. Hamzah Fansuri diperkirakan hidup pada abad ke-16 hingga awal abad ke-17. Hamzah Fansuri adalah seorang sufi dan ulama termuka, semasa hidupnya melakukan perjalanan intelektual ke berbagai pusat kajian Islam, termasuk Banten, Johor, Siam, India, Persia, Mekkah, Madinah, Yerusalem, dan Baghdad. Di Baghdad, ia mendalami Tarekat Qadiriyyah. Setelah pengembaraannya, Hamzah Fansuri kembali ke Aceh, awalnya mengajar di Barus, lalu pindah ke Banda Aceh. Masyarakat meyakini makamnya terletak di antara Singkel dan Rundeng. Perjalanan dan pengalaman intelektualnya sangat memengaruhi pemikiran dan karya-karyanya yang bernilai filosofis dan sufistik. Hamzah Fansuri juga

⁷⁶ Inayatillah, "Entitas Aceh Di Asia Tenggara: Histori Dan Refleksi," *Proceeding of Dirundeng International Conference on Islamic Studies (DICIS 2022)*, 2023, 235–49.

berperan dalam mengembangkan bahasa Melayu sebagai medium sastra yang kaya akan makna spiritual.⁷⁷

Hamzah Fansuri yang mempunyai banyak karya, Sebagian besar tulisannya menjadi korban pembakaran pada tahun 1637 M. Peristiwa ini terjadi saat ia dan muridnya, Syamsuddin as-Sumatrani, dihukum dan karya-karya mereka dibakar di halaman Masjid Raya Baiturrahman pada tahun pertama pemerintahan Sultan Iskandar Tsani. Pembakaran ini merupakan bagian dari penumpasan ajaran Wahdatul Wajud yang dianggap sesat oleh Nuruddin ar-Raniri, seorang ulama berpengaruh yang menjadi qasi Sultan pada masa itu. Meskipun banyak karyanya yang dimusnahkan, beberapa tulisan Hamzah Fansuri berhasil diselamatkan oleh pengikutnya dan masih dapat dibaca hingga saat ini.⁷⁸

Selanjutnya ada Syamsuddin bin Abdullah as-Sumatrani, juga dikenal sebagai Syamsuddin Pasai, ia adalah seorang ulama besar Aceh yang hidup pada abad ke-16 dan ke-17. Ia merupakan murid dari hamzah Fansuri dan banyak belajar tentang Pendidikan kesufian. Tidak informasi yang jelas mengenai tempat dan waktu kelahiran Syamsuddin as-Sumatrani. Ia wafat dalam pertempuran melawan Portugis di Malaka pada tahun 1630 M, tetapi lokasi makamnya tidak diketahui pasti. Syamsuddin as-Sumatrani adalah seorang mufti dan penasihat Sultan Iskandar Muda, seorang pembesar dan penghulu agama, seorang syekh terkemuka yang berada di lingkungan istana kerajaan Aceh Darussalam. Syamsuddin as-Sumatrani sudah tinggal di Aceh sejak akhir abad ke-16 sampai pertengahan abad ke-17 di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Syamsuddin as-Sumatrani dikenal sebagai ahli tasawuf yang memiliki peranan penting di Kerajaan Aceh terutama ketika ia menjadi

⁷⁷ Syamsun Ni'am, "Hamzah Fansuri: Pelopor Tasawuf Wujudiyah Dan Pengaruhnya Hingga Kini Di Nusantara," *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 12, no. 1 (2017): 261–86, <https://doi.org/10.21274/epis.2017.12.1.261-286>.

⁷⁸ Inayatillah, Op. Cit., Hal 245.

mufti pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda. Syekh Syamsuddin juga merupakan seorang penulis yang produktif pada masa itu. Ia menulis sejumlah karya monumental, diantaranya: *Jawhar al-haqa'iq*, *Risalat tubayyin mulahazat al muwahhidin fi dzikir Allah*, *Mir'at al-mu'minin*, *Syarh ruba'I hamzah fansuri*, *Nur al-daqa'iq*, *Thariq al-salikin*, *Mir'at al-iman*, *Kitab al-harakah* dan *Dzikir da'irat qawsany al-adna*.⁷⁹

Berikutnya ada Nuruddin Ar-Raniry yang mempunyai nama lengkap Nuruddin Muhammad bin Ali bin Hasanji ak-hamid asy-Syafi'I al-Asy'ari al-Aydarusi ar-Raniry, diperkirakan lahir pada akhir abad ke-16 di Ranir, Gujarat, India, dan wafat pada 21 September 1658. Ia adalah seorang ulama yang menjadi penasihan di Kesultanan Aceh pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Tsani (1637-1644). Awalnya, kedatangannya ke Aceh tidak disambut baik oleh Sultan yang berkuasa saat itu karena perbedaan pandangan teologis, sehingga ia meneruskan perjalanan ke Pahang sebelum akhirnya kembali ke Aceh. Ar-Raniry dikenal karena keluasan ilmunya dalam berbagai bidang seperti sufisme, kalam, fikih, hadis, sejarah, dan perbandingan agama, serta produktivitasnya dalam menulis, dengan karya terkenal adalah “Bustanus al-Salatin”.⁸⁰

Nuruddin Ar-Raniry diangkat sebagai mufti kerajaan pada masa Sultan Iskandar Tsani, yang menjadi kesempatan baginya untuk menyebarkan ajaran tasawuf akhlaki. Jabatan ini memudahkannya membersihkan pemahaman tasawuf sebelumnya yang dianggap menyimpang, yaitu ajaran Wujudiyah Hamzah Fansuri dan Syamsuddin

⁷⁹ Dalmi Iskandar Sultani and Syarifuddin Syarifuddin, “Ajaran Pendidikan Islam Syaikh Syamsuddin As-Sumatrani,” *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 15, no. 1 (2023): 68–83, <https://doi.org/10.37252/annur.v15i1.447>.

⁸⁰ Zulhelmi, “NURUDDIN AL-RANIRY DAN SIKAPNYA TERHADAP PLURALITAS PEMAHAMAN AGAMA (Studi Kasus Di Aceh Abad Ke-17),” *Substantia* 19, no. 2 (2017): 169–88, <http://substantiajurnal.org>.

as-Sumatrani. Ar-Raniry menganggap paham Wujudiyah berbahaya bagi akidah umat Islam karena dapat menimbulkan kesalahpahaman. Ajaran tasawuf akhlaki yang dibawa Ar-Raniry mendapat tempat di kalangan penduduk Aceh yang mayoritas berpaham Sunni. Selama menetap di Aceh, Ar-Raniry menghasilkan banyak karya, khususnya di bidang tasawuf. Ia juga berperan dalam menetapkan hukum Islam di Aceh. Ar-Raniry melarang kegiatan dan kajian terhadap karya-karya ulama Wujudiyah.⁸¹

Dan yang terakhir adalah Abdurrauf al-Singkili yang mempunyai lama lengkap Abdurrauf bin Ali al-Fansuri al-Jawi al-Singkili, yang lahir di Singkil, Aceh. Terdapat perbedaan pendapat mengenai tahun kelahirannya, ada yang menyebutkan tahun 1593 dan pula yang menyatakan 1615, namun pada tahun 1615 adalah tahun yang lebih sering digunakan. Ia belajar berbagai ilmu agama dari ayahnya, Ali Fansuri yang merupakan pendiri Dayah Suro di simpang kanan, Aceh Singkil. Selanjutnya, ia memperdalam ilmunya di Dayah Blang Pirang, Pasai, Aceh Utara, sebelum pergi ke Jazirah Arab untuk menunaikan ibadah haji. Setelah menunaikan ibadah haji, ia menetap di Mekkah untuk memperdalam ilmu agama. Sekitar tahun 1661, al-Singkili kembali ke Aceh dan diangkat sebagai Qadhi kerajaan pada masa Sultanah Ratu Shafiyatuddin. Ia menduduki jabatan ini selama 40 tahun, bahkan merasakan kepemimpinan empat sultanah. Abdurrauf Singkel adalah seorang ulama yang sangat produktif, kreatif, dan evolusioner. Selain sebagai ulama, ia juga menjabat sebagai mufti kerajaan.⁸²

Al-Sungkili dikenal karena pandangannya yang berbeda dengan Ar-Raniry, terutama dalam bidang tasawuf. Meskipun menolak paham wujudiyah, ia bersikap hati-hati dan tidak mengkafirkan pengikutnya. alam

⁸¹ Dzulkifli Hadi Imawan, "Kontribusi Syaikh Nuruddin Ar-Raniry Sebagai Qadli Di Kerajaan Aceh Darussalam Abad Ke-17 M" 4 (2022): 121–28.

⁸² Muliardi Kurdi, *Abdurrauf As-Singkili.Pdf*, 2017.

karyanya, Mir'ah al-Tullab, ia berusaha mencari jalan tengah antara kaum antinomi ekstatik (tasawuf murni) lokal dan kaum Syariah-sentris (fikih), serta memadukan fikih dan tasawuf dalam praktik agama. Al-Singkili juga berhasil mendamaikan pertikaian antara pengikut Nuruddin Ar-Raniry dan Syekh Hamzah Fansuri terkait paham wujudiyah. Selain itu, al-Singkili juga berhasil menuntaskan polemik tentang boleh tidaknya perempuan menjadi sultanah. Fatwanya menjadi rujukan dan berpengaruh besar di negara-negara Islam lainnya. Abdurrauf Singkel memberikan kontribusi besar dalam penyebaran Islam di Nusantara dan juga dikenal sebagai seorang penulis yang produktif. Salah satu karyanya yang terkenal adalah tafsir Qur'an pertama dalam bahasa Melayu.⁸³

Islam di Minangkabau dipengaruhi oleh Abdurrauf Singkel yang mempunyai murid yang bernama Syekh Burhanuddin Ulakan. Syekh Burhanuddin ini dikenal dengan Tuanku Ulakan di Sumatera bagian Barat. Syekh Burhanuddin Ulakan ini lahir pada tahun 1606 M (1029 H) dan wafat pada tahun 1691 (1111 H) di Ulakan, Pariaman. Syekh ini dikenal mendalami ajaran Islam di Aceh dengan berguru kepada Syekh Abdurrauf Singkel. Selama 30 tahun, Syekh Burhanuddin belajar berbagai ilmu keislaman dan tarekat dari Syekh Abdurrauf as-Singkel, termasuk Bahasa Arab, tafsir, hadits, fikih, tauhid, akhlak, tasawuf, Aqidah, dan syariah. Syekh Ahmad al-Qusyasyi dari Madinah memberikan wewenang kepada Syekh Abdurrauf as-Singkel dan Syekh Burhanuddin untuk menyebarkan agama Islam di daerahnya masing-masing. Setelah menuntun ilmu di Aceh, pada tahun 1680, Syekh Burhanuddin kembali ke Minangkabau dan mendirikan surau di Tanjung Medan, Ulakan. Disana, ia menyebarkan ajaran Islam dan mengembangkan Tarekat Syattariyah. Syekh Burhanuddin Ulakan dikenal sebagai ulama yang sangat

⁸³ Inayatillah, Op. Cit., 246

berpengaruh di Miangkabau dan berperan dalam mengembangkan ajaran Islam di wilayah tersebut.⁸⁴



⁸⁴ Syahril Syahril and Del Marjoni, “Jejak Perjuangan Syekh Burhanudin Dalam Mengembangkan Ajaran Islam Di Kabupaten Padang Pariaman,” *Tarikhuna: Journal of History and History Education* 4, no. 1 (2021): 84–98, <https://doi.org/10.15548/thje.v3i1.2947>.